

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG DKI JAKARTA

Afni Nooraini¹

noorainiafni@gmail.com

Abstract

Development undertaken by the government and private still poses a particularly negative impact on the environment. A bad environment will certainly affect the condition of society. Therefore, a balance should give attention to the development of economic, social and environmental, called Sustainable Development. Development in Industrial Estate Pulogadung not meet the elements of sustainable development, it can be seen from the urbanization, environmental pollution, slums, floods, fires and crime. Therefore, researchers are interested in discussing what strategies are used Jakarta regional government in realizing sustainable development around Puogadung Industrial Zone.

The method used in this research is qualitative descriptive with quantitative data usage. The data used are primary data and secondary data. Informants and respondents involved in this study amounted to 81 people who are environmental experts, environmental law enforcement officers, Pulogadung Industrial Zone and society. The technique of collecting data through interviews, observation, documentation and questionnaires were analyzed using triangulation techniques, swot analysis and AHP. The research instrument is the researcher himself.

The conclusion of this research are: The strategy derived from the SWOT analysis include: Intensifying supervision of industrial activities; Encourage and facilitate community-based environmental education; Providing training to employees; Socializing environmentally friendly waste management to the public; Holding regular coordination with other areas to minimize urbanization; Tightening enforcement against companies that violate the rules; Encourage stakeholders to care for the environment; and Doing the physical and inner guidance to the public. Recommendations for this research are: Optimizing supervision; Local governments need to facilitate stakeholders to be more concerned about the environment; Local governments should cooperate with local governments; and area managers should make the lagoon area.

Keyword: Strategy, Sustainable Development, Pulogadung Industrial Estate

¹ Asisten Dosen pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

PENDAHULUAN

Eksistensi suatu negara ditentukan oleh adanya unsur-unsur tertentu yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Menurut Oppenheim dan Lauterpacht, ada tiga unsur pokok yang menjadi persyaratan berdirinya negara yaitu antara lain rakyat/masyarakat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat.

Pemerintah hadir di tengah masyarakat memainkan perannya sebagai fasilitator, penengah agar semua kehidupan bernegara dapat berjalan di koridor yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Ryaas Rasyid,² bahwa, “Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan diadakan untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama”.

Pemerintah baik di pusat maupun daerah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tugas pokok pemerintahan menurut Ryaas Rasyid dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.³ Masing-masing fungsi tersebut harus dilaksanakan secara adil dan seimbang oleh pemerintah sebagai fasilitator sekaligus regulator agar tercipta suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu fungsi penting pemerintah tanpa menganggap rendah kedudukan fungsi lain adalah mewujudkan pembangunan. Pembangunan baik sifatnya fisik maupun non fisik, mutlak menjadi suatu keharusan bagi pemerintah pusat/daerah untuk mengerjakannya, tak terkecuali di daerah terpencil, terluar atau perbatasan sebagai wujud konkrit pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan tidak menimbulkan disparitas antar daerah dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pembangunan yang sifatnya tradisional faktanya telah sukses memajukan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak berhasil dalam segi sosial dan lingkungan. Sebabnya karena pembangunan konvensional meletakkan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan, menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting.

Memasuki abad ke-21, model pembangunan konvensional tidak dapat diterima lagi, karena telah menyebabkan ketimpangan yang lebih besar pada distribusi pendapatan antar negara dan di dalam negara dan rasionya mencapai angka 20/80, dimana negara maju dengan penduduk hanya 20% populasi dunia menguasai 80% pendapatan dunia, dan negara berkembang dengan 80% penduduk dunia menguasai 20% pendapatan dunia.⁴ Pernyataan tersebut dibuktikan dengan kondisi sosial dan lingkungan pada beberapa daerah di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan sebagai dampak dari banyaknya proyek-proyek yang berjalan tidak diimbangi dengan konsep pembangunan yang baik dan benar serta mendukung lingkungan.

Permasalahan lingkungan akan mencuat tatkala hubungan antara manusia dengan masyarakat dan lingkungan hidupnya tumbuh ke arah yang tidak proporsional menuju ke arah

² Muhammad Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000, hlm13

³ Muhammad, Op.cit., hlm 59

⁴ Diterjemahkan oleh Tim Editor dengan bantuan Dian Pramitasari dari Bab 3 “*The Paradigm of Sustainable Development*” dalam *Institutionalising Sustainable Development* (Paris: OECD Publishing, 2007) dalam Iwan J.Azis, Lydia M.Napitupulu, dkk., *Pembangunan Berkelanjutan – Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta : KPG, 2010, hlm 22-23

krisis lingkungan hidup. Bahkan hal ini sudah jelas tersurat sejak ≥ 14.000 tahun yang lalu dalam mushaf Al-Quran yang diturunkan Sang Khaliq⁵. Sejumlah pemikir di *Massachusetts Institute of Technology* dan *Club of Rome*, misalnya memperingatkan bahwa kalau laju pembangunan dunia dan pertumbuhan penduduk dunia tetap seperti ini, pada suatu ketika akan tercapai batas ambang (*thresh-old*) pertumbuhan, dan akan terjadi kehancuran planet bumi ini sebagai sebuah sistem.⁶ Kerusakan-kerusakan yang terjadi disebabkan adanya ketidakseimbangan antara kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu contohnya yaitu perbuatan manusia yang secara terus menerus mengeksploitasi alam yang statusnya sudah semakin kritis. Ketidakseimbangan daerah perkotaan tadi mengakibatkan masalah yang kompleks, misalnya kemiskinan; penurunan kualitas lingkungan (polusi udara, air dan tanah, banjir); urbanisasi; kriminalitas; kemacetan; dan permasalahan lainnya.

Proses pembangunan dengan memperhatikan kepedulian terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan menjadi solusi tepat bagi keberlangsungan makhluk hidup ke depannya. Pembangunan yang dijelaskan tersebut dikenal dengan istilah “Pembangunan Berkelanjutan” yang pertama kali dicetuskan dalam Komisi Brundtland. Dalam *Brundtland Commission Report* yang berjudul *Our Common Future*, dijelaskan batasan tentang *suistanable development* yaitu, “*suistanable development is defined as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”.⁷ Pembangunan boleh dijalankan tentunya, namun ketertiban dalam menjalankan fungsi pembangunan secara bijak tanpa meninggalkan beban bagi masa depan anak cucu kita nanti itu juga penting untuk diprioritaskan.⁸ Jika lingkungan terjaga dan terpelihara dengan baik, InsyaaAllah akan berdampak positif pada seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, manusia merupakan objek dan subjek dari pembangunan.⁹ Oleh sebab itu, setiap perilaku manusia sangat berpengaruh terhadap fenomena alam yang terjadi di masa yang akan datang. Jika fenomena alam sifatnya positif, maka manusia yang hidup di masa lalu telah melindungi kelanggengan alam, akan tetapi jika fenomena alam bersifat negatif, maka kemungkinan besar *effort* manusia di zaman lampau dalam menyelamatkan alam masih sedikit, kurang atau bahkan tidak ada sama sekali.

Pemerintah telah membuat kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan, Undang-Undang tersebut berasas pada Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya membahas poin-poin terkait pembangunan berkelanjutan, yaitu:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁰

⁵ Lihat QS. Ar-Rum: 41 yang artinya, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

⁶ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007, hlm 9

⁷ Surna T. Djajadiningrat, “*Population and Development for a Suistanable Future*”, paper presented in the Seminar “*World Without Borders : Policy Options for Growth and Suistanability in East Asia and the Pacific*, conducted by Society for International Development East Asia and the Pacific Regional Conference, Jakarta, Yogyakarta, Bali, July 18-22, 1990, hlm 3

⁸ Muhammad Junaidi, *Korporasi dan Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm XV

⁹ Ibid

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (4)

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.¹¹

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹²

Undang-undang 32/2009 tersebut telah menjadi respon dari komitmen dan kebutuhan atas desakan masyarakat dunia bagi Indonesia yang dianggap sebagai paru-paru dunia untuk secara serius dalam mengimplementasikan kaidah menyediakan kebutuhan pembangunan pada saat ini dan juga ketersediaan pembangunan pada masa yang akan datang.¹³

Pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara mendukung Undang-Undang tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan salah satu asas yang diusungnya yaitu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹⁴ Hanya saja implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya dijalankan dengan benar sehingga belum efektif, faktanya pencemaran lingkungan¹⁵ (udara, air dan tanah) dan berbagai kerusakan lingkungan¹⁶ lainnya masih terjadi di bumi pertiwi.

Kawasan industri tak pelak menjadi salah satu sumber pendapatan tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian. Kawasan industri pertama, terbesar dan tertua di Indonesia didirikan pada tahun 1973 dikenal dengan Kawasan Industri Pulogadung atau *Jakarta Industrial Estate Pulogadung* (PT.JIEP/Persero).¹⁷ PT.JIEP ini disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin pada tanggal 26 Juni 1973. Saham dari perusahaan ini masing-masing 50% dimiliki oleh Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kawasan industri ini memiliki sekitar 375 perusahaan.

Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta, semestinya menjadi salah satu daerah yang pembangunannya paling baik dan dapat dicontoh oleh daerah lain karena merupakan titik sentral Negara Indonesia. Akan tetapi, realita menunjukkan hal yang berbeda, yakni pembangunan di Jakarta masih jauh dari harapan khususnya bagi warga Jakarta dan umumnya bagi bangsa Indonesia.

Faktanya kehidupan yang ideal tersebut masih belum terwujud sampai saat ini disebabkan masih adanya beberapa permasalahan sosial dan lingkungan di Kota Administrasi Jakarta Timur antara lain masih tingginya kemiskinan dengan jumlah rumah tangga miskin

¹¹ Ibid, pasal 28H ayat (3)

¹² Ibid, ayat (1)

¹³ Junaidi., Op.cit., hlm 3

¹⁴ Lihat dalam pasal 2 ayat (1) huruf j dan huruf k

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat (15), "Pencemaran lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya".

¹⁶ Beberapa persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat, diantaranya mengenai banjir, kebakaran lahan/hutan, bencana asap, *global warming*, kerusakan lahan akibat pertambangan. Diakses dari <http://www.menlh.go.id/review-laporan-kerusakan-lingkungan-dan-perubahan-iklim-tahun-2013-sebagai-bahan-penyusunan-rpjm-tahun-2015-2019/>, 1 Maret 2015, pukul 19.27

¹⁷ Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1 b.3/2/35/69 pada 20 Mei 1969, maka batas-batas Kawasan Industri Pulogadung mencakup 425 hektar; melalui Keputusan Gubernur No. 424 pada 29 April 1981 dan revisi Keputusan No.519 pada 14 Maret 1988 dengan tambahan luas sebesar 183 hektar. Diakses dari <http://jiep.co.id/profil-kip/profil-kawasan/>, 24 Maret 2015, pukul 22.17

sebanyak 701.025 dan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 71.463¹⁸ (apalagi Kota Jakarta Timur ditunjang dengan jumlah penduduk yang paling besar se-DKI Jakarta¹⁹); terjadi penurunan perekonomian di Jakarta Timur pada tahun 2013;²⁰ masih terdapat permukiman kumuh (*slum area*);²¹ kemacetan (LOS (*Level of Service*)/Tingkat Pelayanan Jalan/Kinerja Lalu Lintas di Kota Jakarta Timur tahun 2012 nilainya D yang artinya mendekati arus tidak stabil dan kecepatan rendah);²² tingginya angka kriminalitas (contoh: tingkat kriminalitas di wilayah Jakarta Timur dari Januari-September 2014 mencapai 1.638 tindak kejahatan disebabkan faktor ekonomi, pendidikan dan makin kerasnya persaingan hidup);²³ penurunan kualitas udara (Perbandingan konsentrasi CO₂ (1000µg/m³) dan NO₂ (µg/m³) di Jakarta Timur mengalami kenaikan dari tahun 2011 dan 2012 yaitu CO₂ dari 6 1000µg/m³ menjadi ±6,5 1000µg/m³ dan NO₂ dari ±50 µg/m³ menjadi ±80 µg/m³)²⁴ dan penurunan kualitas air tanah²⁵; tingginya tingkat urbanisasi (Tingkat urbanisasi di DKI Jakarta mengalami stagnasi sejak tahun 1990-2025 yaitu sebesar 100%)²⁶; dan pengelolaan limbah yang belum efektif²⁷.

Persentase penduduk miskin di Kota Administrasi Jakarta Timur mengalami penurunan dari tahun 2009 (3,42%) sampai tahun 2011 (3,06%) dan mengalami kenaikan sampai tahun 2013 (3,10%).²⁸ Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kota Administrasi Jakarta Timur sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2009 (81.200 jiwa) sampai tahun 2010 (91.600 jiwa) dan mengalami penurunan pada tahun 2011 (83.820 jiwa) kemudian mengalami kenaikan kembali sampai tahun 2013 (86.800 jiwa).²⁹ Hal ini menjadi fakta atau gambaran bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah kurang efektif atau belum sepenuhnya tepat sasaran.

Laju perekonomian Kota Administrasi Jakarta Timur yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000 dari tahun 2011 sampai tahun 2013 tidak berjalan stabil (terdapat kenaikan dan penurunan). Tahun 2012 mengalami kenaikan perekonomian sebesar 0,22% (6,50%) dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 (6,28%), sedangkan tahun 2013 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,42% (6,08%) dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar

¹⁸ BPS Provinsi DKI Jakarta, 2012

¹⁹ Kota Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara kota lainnya di DKI Jakarta yaitu dengan jumlah 2.693.896 jiwa. Diakses dari http://www.bps.go.id/booklet/Booklet_Agustus_2012.pdf, 4 Maret 2015, pukul 23.09

²⁰ Lihat Tabel 1.3

²¹ Terdapat 2 RW termasuk kumuh berat, 3 RW kumuh sedang, 9 RW kumuh ringan, dan 18 RW kumuh sangat ringan. Diakses dari http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/EVALUASI-RUKUN-WARGA--RW--KUMUH-DKI-JAKARTA-2013.pdf, tanggal 13 Mei 2015, pukul 09.17

²² Diakses dari http://www.menlh.go.id/DATA/evaluasi_kota_2012.pdf, 23 Januari 2015, pukul 14.36

²³ Diakses dari <http://www.aktual.co/jakartaraya/angka-kriminalitas-di-jakarta-timur-masih-tinggi>, 23 Januari 2015, pukul 10.00

²⁴ Diakses dari http://www.menlh.go.id/DATA/evaluasi_kota_2012.pdf, 23 Januari 2015, pukul 15.31

²⁵ Lihat pada Tabel 1.4

²⁶ Berdasarkan Sensus Penduduk 1990,2000,2010, dan Survey Antar Sensus (SUPAS) 1995, 2005 yang diakses dari http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-2.pdf, 4 Maret 2015, pukul 24.00

²⁷ Salah satu contohnya yaitu Pabrik tahu yang sedikitnya ada 50 pabrik. Masalahnya ada beberapa pabrik yang tidak mengolah limbahnya secara benar karena pengolahannya cukup kompleks. Hal itu berdampak negatif seperti polusi air, udara, sumber penyakit, bau tidak sedap sehingga meningkatkan pertumbuhan nyamuk dan menurunkan keindahan lingkungan. Diakses dari http://beritajakarta.com/read/2413/Limbah_Tahu_di_Jaktim_Cemari_Lingkungan, 16 Maret 2015, pukul 11.55

²⁸ Diakses dari <http://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/54>, tanggal 13 Mei 2015, pukul 8.10

²⁹ Diakses dari <http://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/53>, tanggal 13 Mei 2015, pukul 8.12

6,50%.³⁰ Sebagian besar jenis lapangan usaha mengalami penurunan, akan tetapi terdapat 2 jenis usaha yang mengalami kenaikan yaitu pertanian dan industri pengolahan.

Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki permasalahan yang cukup serius dalam hal kualitas air, karena terdapat beberapa parameter yang telah diuji oleh BPLHD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 telah melebihi baku mutu normal yang ditetapkan pemerintah yaitu diantaranya Zat Padat Terlarut (TDS), Kekeruhan, Besi (Fe), Mangan (Mn), Detergen (MBAS), Sulfat (SO₄) dan nilai Bakteri E.Coli merupakan yang paling tinggi dibandingkan wilayah Jakarta lainnya dan tersebar hampir di seluruh daerah di Jakarta Timur.³¹ Hal ini disebabkan oleh kondisi permukiman yang sangat padat dan belum adanya pengolahan limbah secara terbuka. Akan tetapi, pada tahun 2013 terdapat peningkatan status air tanah yang signifikan menuju kondisi baik dan penurunan jumlah pencemaran baik ringan, sedang dan berat.³²

Kawasan Industri Pulogadung ini terletak di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur. Kelurahan Jatinegara adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Cakung yang hampir semua wilayahnya (11 RW dari 14 RW) berada di pinggiran Kawasan Industri Pulogadung (sekitar 398,15 Ha). Kelurahan Rawa Terate adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Cakung yang memiliki 6 RW dan lebih dari setengah luas wilayahnya (sekitar 187 Ha) untuk sektor perindustrian.

Adanya kegiatan industri yang dikelola oleh PT.JIEP di lingkungan Kelurahan Jatinegara maupun di Kelurahan Rawa Terate ini telah menimbulkan beberapa permasalahan dan belum mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta³³ dan visi PT.JIEP³⁴. Munculnya permasalahan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah belum melakukan koordinasi dan pengawasan dengan baik kepada PT. JIEP sebagai pengelola.

Beberapa permasalahan yang terdapat di Kelurahan Jatinegara dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di pinggiran kawasan industri antara lain tingginya tingkat urbanisasi (Tahun 2011 berjumlah 1.023 jiwa, tahun 2012 berjumlah 1.319, tahun 2013 berjumlah 1.740 jiwa dan tahun 2014 berjumlah 2.008 jiwa)³⁵, tingginya kepadatan penduduk (Jumlah Penduduk tahun 2011 yaitu 99.592 jiwa, tahun 2012 yaitu 99.799 jiwa, tahun 2013 yaitu 100.362 jiwa, tahun 2014 yaitu 97.093 jiwa dan tahun 2015 yaitu 94.885 jiwa. Hal ini juga disebabkan angka kelahiran tinggi yaitu tahun 2011 berjumlah 711 jiwa, tahun 2012 berjumlah 790 jiwa, tahun 2013 berjumlah 1.603 jiwa dan tahun 2014 berjumlah 1.832 jiwa)³⁶; masih terdapat kemiskinan (Dilihat dari data keluarga pra sejahtera tahun 2015 yang

³⁰ Berita Resmi Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur No.03/09/3172/Th.VI, 24 September 2014

³¹ BPLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

³² SLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

³³ Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2013-2017 adalah: "Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik". Misinya sebagai berikut: (1) Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain; (3) Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta; (4) Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota; dan (5) Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Diakses dari http://beritajakarta.com/statistics/visimisi_gubernur, tanggal 9 Mei 2015, pukul 22.17

³⁴ Visinya yakni "Menjadi Pengembang dan Pengelola yang Berstandar Internasional di Bidang Kawasan Terpadu Untuk Industri, Bisnis, Properti, Logistik, yang Mandiri dan Bernilai Tambah Tinggi Serta Berwawasan Lingkungan". Diakses dari <http://jiep.co.id/>, 10 April 2015, pukul 10.28

³⁵ Statistik Penduduk Tingkat Kelurahan Jatinegara Tahun 2011-2014

³⁶ Ibid

berjumlah 3.797 KK)³⁷; terjadinya pencemaran air dan udara;³⁸ tingginya kerawanan sosial (tawuran)³⁹ dan kriminalitas (Daerah rawan kriminalitas terletak di RW 01 dan RW 11. Kriminalitas pada tahun 2014 berjumlah 18 kali dan tahun 2015, 23 kali terjadi yang terdiri dari tawuran, perampokan, kebakaran, unjuk rasa dan pembunuhan);⁴⁰ terdapat permukiman kumuh (Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang, permukiman kumuh di Kelurahan Jatinegara terdapat di RW 05 dan RW 12)⁴¹; terdapat daerah rawan kebakaran⁴²; dan permasalahan lainnya. Sedangkan permasalahan di Kelurahan Rawa Terate dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan khususnya dengan kondisi di pinggiran kawasan industri diantaranya masih adanya kawasan permukiman kumuh;⁴³ masih cukup tingginya angka kemiskinan;⁴⁴ tingginya gelombang urbanisasi; masih terdapat beberapa titik daerah rawan banjir meskipun telah dibuat lubang biopori/resapan ± 761 biopori (Daerah rawan genangan air dan banjir yaitu di RT 015 dan RT 016 RW 04, RT 001 dan RT 010 RW 05)⁴⁵; Masih terdapat kawasan rawan kebakaran;⁴⁶ terdapat pencemaran air (Pada Bulan September 2012, daerah yang melebihi standar baku mutu Mangan (Mn) normal 0,5 mg/L yaitu di Kelurahan Rawa terate dengan nilai 1,19 mg/L), tanah (oleh limbah domestik) dan udara; dan permasalahan lainnya.

Jumlah warga miskin di Kelurahan Rawa Terate mengalami kenaikan dari tahun 2011-2012 berjumlah 329 jiwa, sedangkan dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan berjumlah 137 jiwa.⁴⁷

Kelurahan Rawa Terate memiliki rumah kumuh, daerah kawasan banjir dan daerah kawasan kebakaran yang lebih banyak (4 RW) dibandingkan dengan Kelurahan Jatinegara (1 RW). Jumlah penduduk yang tinggal di permukiman kumuh di Kelurahan Rawa Terate berjumlah 4.124 KK atau 11.883 jiwa, sedangkan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh di Kelurahan Jatinegara berjumlah 868 KK atau 3735 jiwa. Di Kelurahan Rawa Terate terdapat 11 RT rawan banjir, sedangkan di Kelurahan Jatinegara hanya 2 RT yang rawan banjir.⁴⁸ Di Kelurahan Rawa Terate terdapat 5 daerah rawan kebakaran, sedangkan di Kelurahan Jatinegara terdapat 2 RT rawan kebakaran.

Dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan *research* tentang “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Industri Pulogadung”.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang penulis konstruksikan dalam penelitian ini, yaitu:

³⁷ Ibid

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang selaku Kasi Kesejahteraan Masyarakat pada tanggal 30 Maret 2015, pukul 11.25. Beliau mengatakan bahwa pencemaran air ini disebabkan oleh bahan-bahan buangan yang tidak disaring terlebih dahulu, seperti contohnya pemotongan ayam yang paling berperan dalam menimbulkan pencemaran air.

³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang, beliau mengatakan bahwa kerawanan sosial yaitu tawuran pemuda-pemuda di sepanjang rel kereta api di RT 08. Tawuran ini meresahkan warga karena pelaku tawuran juga menjarah barang-barang warga bahkan pernah sampai mencuri uang warga senilai Rp.15.000.000,-.

⁴⁰ Laporan tahunan Kelurahan Jatinegara Tahun 2014 dan 2015

⁴¹ Dapat dilihat di Tabel 1.6

⁴² Daerah yang rawan kebakaran yaitu terletak di Kawasan Industri Pulogadung (PT.JIEP). Lihat Tabel 1.7

⁴³ Lihat Tabel 1.7

⁴⁴ Lihat Tabel 1.6

⁴⁵ Diakses dari <http://www.Rawaterate.net/?page=Gambaran.Umum>, 17 Maret 2015, pukul 06.56

⁴⁶ Lihat Tabel 1.7

⁴⁷ Laporan hasil kegiatan Oktober 2014 Pemerintah Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung

⁴⁸ BPS DKI Jakarta Tahun 2013

- 1) Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pulogadung?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif (karena ingin *in-depth interview*) dengan penggunaan data kuantitatif.⁴⁹ Data kuantitatif yang digunakan maksudnya yaitu data/dokumen yang diperoleh peneliti dengan diukur melalui statistik deskriptif yang kemudian dinarasikan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT dari Freddy Rangkuti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan 13 orang informan dan 81 orang responden (untuk SWOT).

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu *semistructure interview*, *structured observation*, dokumentasi dan angket tertutup. Dalam rangka menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri dengan menggunakan bantuan pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi dan kuesioner.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Strategi

Dalam kurun waktu yang sangat lama, kata “strategi” digunakan secara sempit sebatas pada konteks militer-politik, tetapi seiring berjalannya waktu penggunaan kata ini semakin meluas masuk ke ranah organisasi swasta, bahkan organisasi publik. Strategi yang dibuat organisasi swasta terkait erat dengan peningkatan pemasaran, peningkatan *profit*, peningkatan kreativitas, dan peningkatan dalam aspek lain dengan maksud agar organisasi eksis dan dapat bersaing dengan pihak swasta lain. Strategi yang diciptakan oleh organisasi publik terkait dengan peningkatan fungsi-fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan agar seluruh kebutuhan dan hak masyarakat dapat terpenuhi.

Ireland dkk menyatakan bahwa *a strategy is an integrated and coordinated set of commitments and actions designed to exploit core competencies and gain a competitive advantage*.⁵⁰ Strategi menjadi satu perpaduan antara sinkronisasi seluruh kegiatan dan tanggung jawab seluruh pegawai dalam organisasi untuk menggali kelebihan-kelebihan yang dapat disaingkan dengan organisasi lain.

Pada dasarnya yang dimaksud strategi bagi organisasi swasta maupun organisasi publik adalah rencana dengan skala besar yang berorientasi jangkauan jauh ke depan dan ditetapkan sematang mungkin oleh internal organisasi agar mereka dapat berinteraksi secara efektif dan intensif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai target organisasi yang berkaitan.

Konsep Formulasi Strategi Dengan Analisis SWOT

Pada akhir tahun 1950-an, Kenneth Andrews dari *Harvard Business School* mengembangkan pola SWOT sebagai suatu alat analisis yang sistematis dan terorganisasi dengan baik untuk mengkaji lingkungan internal dan eksternal sebuah organisasi. Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan perusahaan disebut faktor-faktor strategis dan

⁴⁹ Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka-angka sebagai hasil observasi atau pengukuran. Data kuantitatif bersifat objektif dan bisa ditafsirkan sama oleh semua orang. Dalam Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, hlm 21

⁵⁰ R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson & Michael A. Hitt, *The Management of Strategy-Concept and Cases*, South Western: Cengage Learning, 2008, p.4

diringkas dengan singkatan S.W.O.T yang berarti *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan) dan *Threats* (ancaman).⁵¹

Jika disederhanakan, maka analisis SWOT adalah cara untuk mengoreksi diri (internal) dan memperhitungkan berbagai bentuk ancaman yang berasal dari luar (eksternal) organisasi agar organisasi mengalami keseimbangan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, tidak mudah goyah ketika diterpa keadaan tertentu yang dapat membahayakan organisasi.

Konsep Pembangunan

*Development is any and all kinds of activities or processes that increase the capacity of people or the environment to meet human needs or improve the quality of human life. The product of development is people who are healthy, well-nourished, clothed, and housed; engaged in productive work for which they are well-trained; and able to enjoy the leisure and recreation we all need. Development is a complex of activities, some with social, some with economic objectives, some based on material resources, some on intellectual resources, all enabling people to reach their full potential and enjoy a good life.*⁵²

Definisi pembangunan itu dinamis, berkembang searah dengan perkembangan zaman, hal ini dijabarkan sebagai berikut, "Konstataasi penganut aliran fenomenologi yang menegaskan bahwa proses mental seseorang/masyarakat membentuk realita sosial, bahwa kesadaran seseorang atau masyarakat mewarnai persepsi mereka terhadap realita, dapat menjadi *explanatory variable* mengapa konsep pembangunan begitu *multi-interpretable*. Pembangunan sebagaimana realita pada umumnya, menjadi *self-projected reality* yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Pembangunan juga seringkali menjadi semacam *ideology of developmentalism*. Karena pengalaman suatu bangsa yang mempengaruhi kesadaran tersebut tidaklah statis, maka interpretasi mereka tentang pembangunan tidak pula statis".⁵³

Pembangunan diinterpretasikan beragam oleh para pakar atau para ahli. Peneliti dapat katakan bahwa pembangunan merupakan kegiatan-kegiatan yang terkonsep dan tersusun secara rapi dan matang oleh *stakeholders* dengan maksud agar tercipta perubahan menuju keadaan/kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pada tahun 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali mengadakan sebuah pertemuan yang membahas tentang masalah-masalah lingkungan yang dikenal dengan Deklarasi Stockholm.⁵⁴ Di konferensi itulah untuk pertama kalinya secara luas perwakilan warga dunia menekankan perlunya memperhitungkan aspek lingkungan pada program-program pembangunan yang selama ini dijalankan.⁵⁵

Dua puluh tahun selepas konferensi Stockholm, PBB menyelenggarakan konferensi tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*, UNCED) di Rio de Janeiro, Brasil, pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992, disebut dengan KTT Rio (Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio)/*The Earth Summit*. KTT

⁵¹ J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Strategic Management 5th Edition (Manajemen Strategis)*, yang diterjemahkan oleh Julianto Agung-Ed.II, Yogyakarta: Andi, 2003, hlm 9

⁵² IUCN-The World Conservation Union, edited by Thaddeus C.Trzyna, *A Sustainable World, Defining and Measuring Sustainable Development*, North America: International Center for the Environment and Public Policy, 1939, p.28

⁵³ Moeljarto, Op.cit, hlm 7

⁵⁴ Konferensi ini diselenggarakan oleh PBB tanggal 5-16 Juni 1972, bertujuan untuk merundingkan isu-isu penting mengenai lingkungan hidup. Konferensi ini umumnya disingkat menjadi UNCHE 1972 (*United Nations Conference on Human Environment, 1972*). Konferensi ini dihadiri oleh 113 negara, 21 organisasi PBB, 16 organisasi antar pemerintah dan 258 LSM (NGOs) dari berbagai negara.

⁵⁵ Azis, Op.cit, hlm 1

Rio merupakan suatu respon yang ditunjukkan negara di seluruh dunia bagi perkembangan masalah lingkungan yang semakin kronis setelah adanya Konferensi Stockholm.

Sejarah berdirinya pembangunan berkelanjutan diawali dengan terbentuknya Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*, WCED) yang lebih dikenal dengan Komisi Brundtland.⁵⁶ *At that time, the UN General Assembly realized that there was a heavy deterioration of the human environment and natural resources. To rally countries to work and pursue sustainable development together, the UN decided to establish the Brundtland Commission.*⁵⁷ Kemudian Komisi ini menggulirkan konsep pembangunan berkelanjutan, *“sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”*.⁵⁸ Ada dua kunci konsep utama dari definisi tersebut. Pertama, konsep tentang kebutuhan atau *needs* yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan. Kedua, konsep tentang keterbatasan atau *limitation* dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.⁵⁹

Dr. Emil Salim (1990) dalam makalahnya berjudul *“Sustainable Development: An Indonesian Perspective”* menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang (*a longer term perspective*). Konsep tersebut menuntut adanya solidaritas antar generasi. Dalam konteks Indonesia, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan juga mengeliminasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.⁶⁰

Konsep Kawasan Industri

Kawasan merupakan daerah yang secara geografis dapat sangat luas atau terbatas.⁶¹ Industri didefinisikan oleh Hill dan Jones sebagai sekelompok perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dasar yang sama bagi para konsumen.⁶²

Kawasan industri (*Industrial Zone*) adalah kawasan khusus untuk kegiatan industri pengolahan atau manufaktur; kawasan ini dilengkapi dengan prasarana, sarana/fasilitas penunjang yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri. Pemberian izin lokasi suatu kawasan industri oleh pemda setempat.⁶³

Pada tataran lokal, antara kawasan pemukiman dengan kawasan industri juga merupakan dua zona yang tidak kompatibel, sehingga umumnya diperlukan pemisahan zona

⁵⁶ Komisi ini dilaksanakan pada tahun 1987, yang diketuai oleh Ny.Gro Harlem Brundtland, mantan Perdana Menteri Norwegia, kemudian selanjutnya komisi ini dikenal dengan Komisi Brundtland. Komisi ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi saran bagi proses pembangunan berkelanjutan. Komisi ini resmi dibubarkan pada bulan Desember 1987 setelah laporannya terhimpun dalam buku *Our Common Future*. Komisi ini terdiri dari 9 orang mewakili negara maju dan 14 orang mewakili negara berkembang. Salah seorang anggotanya adalah Emil Salim sebagai perwakilan dari Indonesia, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

⁵⁷ Diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission, 6 Februari 2015, pukul 10.18

⁵⁸ Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan-Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hlm 2

⁵⁹ Gro Harlem Brundtland, *Our Common Future*. The World Commission on Environment and Development, Oxford, New York : Oxford University Press, 1987, hlm 43

⁶⁰ Sudharto, Op.cit., hlm 2

⁶¹ Kamus Tata Ruang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Edisi 1, Jakarta Tahun 1997 yang dikutip dalam Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 58

⁶² Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, Bandung: Erlangga, 2012, hlm 36

⁶³ Ibid, hlm 59

penggunaan lahan yang tidak kompatibel tersebut.⁶⁴ Kedua zona tersebut menurut peneliti kurang tepat jika berada dalam lingkup yang berdekatan, karena para pemegang industri sebagian besar kurang memperhitungkan dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sekitar Kawasan Industri Pulogadung

Strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Jakarta Timur untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pulogadung dijelaskan peneliti dengan menggunakan analisis SWOT dari Freddy Rangkuti yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

Kekuatan (*Strengths*)

a. Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, yang dapat dilihat dari visi dan misinya. Visi Provinsi DKI Jakarta adalah, “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”. Sedangkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain:

- 1) Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain;
- 3) Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta;
- 4) Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;
- 5) Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Jika diamati dari visi dan misi di atas, maka sudah banyak elemen-elemen yang mengarah pada terciptanya pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan pembenahan-pembenahan terhadap masalah krusial yang sedang dihadapi Jakarta saat ini. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang baik dan visioner. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta juga berkomitmen untuk dapat taat asas atau ajek terhadap kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta.

Pemerintah DKI Jakarta memang berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, hanya saja semua itu kan tergantung pimpinan. Saya lihat contohnya untuk pengurangan emisi gas rumah kaca tidak menjadi prioritas saat ini dari pimpinan (Gubernur).⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, Pemerintah DKI Jakarta memiliki komitmen yang cukup tinggi dengan mendukung segala program yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, seperti mewajibkan kepada setiap pelaku usaha di DKI Jakarta

⁶⁴ Sumbangan Baja, *Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah: Pendekatan Spasial & Aplikasinya*, Yogyakarta: ANDI, 2012, hlm 82

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kasubbid. Perubahan Iklim, Ibu Susi Andriani, tanggal 15 Juni 2016, pukul 11.15 di Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

untuk membuat izin lingkungan (yang ditangani oleh PTSP), kemudian melakukan pengawasan dan penindakan terhadap hasil dari pengawasan.

b. Ketersediaan Sumber Daya Finansial dan fisik yang memadai

Sumber Daya Finansial yaitu berupa anggaran. Anggaran di Provinsi DKI Jakarta dan di Kota Administrasi Jakarta Timur ada yang dianggap memadai dan ada yang kurang memadai. Akan tetapi sebenarnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran yang besar, hanya saja penggunaan anggaran tersebut setiap tahun besarnya berbeda untuk setiap kegiatan, karena ada kegiatan-kegiatan tertentu yang diprioritaskan per tahunnya. Semua ini tentu tergantung pada kebijakan dan keputusan Gubernur dan/atau Kepala Daerah bersama DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada akhirnya hanya bisa menerima dan mengoptimalkan anggaran yang telah diberikan.

Sumber Daya Fisik yang digunakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan khususnya di sekitar Kawasan Industri Pulogadung sudah cukup memadai baik dalam mengecek kualitas air (*water quality checker* dan alat-alat di lab) maupun udara (pengukur kualitas udara metode ambient dengan Sistem Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) PM 2,5) pada beberapa titik sampling di kawasan tersebut, meskipun sudah ada beberapa alat yang lebih canggih, namun yang digunakan sampai saat ini masih cukup baik/bagus untuk melihat kualitas air dan udara di DKI Jakarta.

c. Koordinasi yang baik antar SKPD di Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Koordinasi antara SKPD di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Timur sudah berjalan dengan baik khususnya untuk hal-hal yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Koordinasi ini bentuknya beragam di Provinsi DKI Jakarta, seperti melalui rapat-rapat rutin, komunikasi langsung maupun tidak langsung (menggunakan aplikasi tertentu, seperti *whatsapp*, *bbm*, *email*, *faximile* dan sebagainya) dan aplikasi *qlue*. Semua media di atas telah digunakan oleh Pemda DKI Jakarta secara intensif untuk mempermudah komunikasi baik antar pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat (seperti kritik, keluhan, pendapat, bantuan dan sebagainya terhadap kinerja pemerintah daerah).

Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Rendahnya Kuantitas Sumber Daya Manusia yang ahli

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini dapat dikatakan masih kurang khususnya yang profesional/ahli di bidang tertentu, seperti di bidang industri minim auditor, di bidang lingkungan yaitu ahli yang mengerti iklim, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang merupakan pejabat fungsional dan *surveyor*, di kelurahan Jatinegara kekurangan SDM yang ahli di bidang teknologi informasi. Minimnya jumlah auditor di bidang industri dan PPLHD salah satunya disebabkan cepatnya *rolling* baik di tingkat atasan maupun staf di DKI Jakarta. Kurangnya PPLHD baik di BPLHD dan KPLH Jakarta Timur, menyebabkan pengawasan terhadap kegiatan industri di Kawasan Industri Pulogadung berjalan kurang optimal. Banyaknya industri di DKI Jakarta tidak diimbangi dengan jumlah SDM yang mumpuni.

b. Kurangnya penegakan terhadap kebijakan-kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan

Untuk menciptakan suatu daerah yang berkelanjutan perlu adanya dukungan penuh dan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah. Salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan yang mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Pemerintah DKI Jakarta sudah cukup mendukung dengan mengeluarkan beberapa kebijakan (baik itu berupa SK Gubernur ataupun Peraturan Daerah) yang sejalan dengan peraturan di atasnya dan diterbitkan pemerintah, khususnya dalam hal ini yang terkait dengan lingkungan, ekonomi dan sosial (pembangunan berkelanjutan).

Kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan berkelanjutan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomot 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukkan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 3) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 69 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan dan/atau Usaha;
- 4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau;
- 5) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- 6) Peraturan lainnya.

Kebijakan-kebijakan di atas pada umumnya belum diimplementasikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan pencemaran lingkungan yang cukup tinggi.

c. Belum terciptanya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan

Limbah menjadi satu hal yang perlu mendapatkan perhatian penting karena merupakan sisa hasil buangan dari suatu produksi dan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah yang diproduksi masyarakat di sekitar Kawasan Industri Pulogadung baik di Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara sebagian besar mengandalkan jasa-jasa tukang sampah dengan membayar secara rutin per bulan atau langsung membuang ke truk sampah dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, sudah ada beberapa Rukun Warga (RW) dari kedua kelurahan tersebut yang memanfaatkan limbah dengan mendirikan “Bank Sampah”.⁶⁶

Peluang (*Opportunities*)

a. Terbukanya lapangan pekerjaan

Lahan bisnis yang besar akan mempengaruhi dinamika kehidupan warga. Dengan banyaknya perusahaan di Kawasan Industri Pulogadung, hal ini tentu membuka lowongan kerja, umumnya bagi warga di dalam dan luar Jakarta dan khususnya bagi warga sekitar/pinggiran kawasan tersebut. Ketersediaan lapangan pekerjaan ini akan berpengaruh secara langsung pada perekonomian masyarakat dan secara tidak langsung pada perekonomian daerah (investasi negara).

Ada sedikit ketidaksinkronan data yang peneliti dapatkan. Di satu sisi, pihak JIEP menganggap bahwa warga sekitar sebanyak 30-40% sudah bekerja di perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Pulogadung. Tapi hal tersebut sedikit tidak sejalan dengan pernyataan salah satu Ketua RW di pinggiran kawasan tersebut yang menyatakan bahwa hanya sedikit sekali warga asli sekitar yang bekerja di Kawasan Industri Pulogadung, itu pun bahkan sebagian besar sifatnya *outsourcing*. Dan sebagian besar warga yang bekerja disana merupakan warga pendatang dari luar Jakarta. Hal ini tentunya menimbulkan kesenjangan sosial. Akan tetapi, masyarakat sekitar juga terkena *trickle down effect* dari kawasan ini yakni dengan membuka usaha-usaha yang memfasilitasi kehidupan para pekerja di kawasan tersebut, seperti kos-kosan, berdagang (warung, gerobak makanan atau minuman), dan sebagainya. Warga memiliki harapan besar untuk masyarakat di sekitar kawasan dapat lebih diberdayakan dan diprioritaskan dalam mendapatkan pekerjaan. Tapi hal ini tentu disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Peningkatan perekonomian daerah dapat dilihat dari PDRB Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan harga berlaku, kontribusi terbesar lapangan usaha dalam PDRB

⁶⁶ Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah.

pada tahun 2010 sampai tahun 2013 adalah industri pengolahan kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran.⁶⁷

b. Pengawasan terhadap kegiatan industri lebih mudah

Salah satu kelebihan yang dimiliki Kawasan Industri Pulogadung yakni merupakan area khusus terpadu dengan beragam jenis perusahaan yang memudahkan pemerintah dalam melakukan pengamatan, pemeriksaan dan pengendalian terhadap kegiatan industri yang ada.

Pengawasan di kawasan industri membutuhkan kerjasama antara Pemerintah daerah dan pihak PT. JIEP. Karena dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan KPLH didapatkan data bahwa PT. JIEP sebagai pengelola lebih responsif atau *open* dengan Pemerintah Provinsi dibandingkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini disebabkan Kawasan Industri Pulogadung ini setengah sahamnya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga mungkin mereka merasa lebih bertanggungjawab kepada Pemerintah Provinsi dibandingkan kepada Pemerintah Kota Jakarta Timur.

c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di era ini, memberikan peluang kepada setiap pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan perkembangan tersebut. Kecanggihan IPTEK ini mudah didapat di Jakarta, karena merupakan daerah paling strategis sebagai pusat perdagangan terbesar di Indonesia. Artinya, pelaku usaha dihimbau untuk menerapkan teknologi terbaru yang lebih ramah lingkungan. Sebagian besar orang saat ini telah banyak memproduksi alat-alat yang *welcome* terhadap lingkungan, karena tingkat kesadaran manusia akan alam sudah cukup tinggi.

Tantangan (Threats)

a. Peningkatan urbanisasi

Terdapat 2 (dua) jenis migrasi yang akan dibahas yaitu migrasi seumur hidup (*life time migration*)⁶⁸ dan migrasi risen (*recent migration*)⁶⁹.

Pada tahun 2010, jumlah migran masuk seumur hidup naik menjadi 4.342,01 ribu jiwa atau sekitar 45,28% dari total penduduk DKI Jakarta.⁷⁰ Kota Administrasi yang cukup banyak diminati oleh kaum migran risen salah satunya adalah Kota Administrasi Jakarta Timur. 654,80 ribu migran, sekitar 31,44% (205,89 ribu jiwa) tinggal di Jakarta Timur. Diperkirakan wilayah tersebut cukup menarik minat kaum migran karena di wilayah tersebut terdapat kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja cukup banyak.⁷¹

Tabel 1
Jumlah pendatang ke kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2011-2015

No	Kelurahan	Tahun (jiwa/orang)			
		2011	2012	2013	2014
1	Rawa Terate	334*	± 375	520	616
2	Jatinegara	1.023	1.319	1.740	2.008

Sumber: Statistik Penduduk Tingkat Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan

⁶⁷ Lihat [http://timur.jakarta.go.id/v11/?p=pelayanan.perekonomian dan](http://timur.jakarta.go.id/v11/?p=pelayanan.perekonomian%20dan%20infrastruktur)
https://jaktimkota.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Produk-Domestik-Regional-Bruto-Jakarta-Timur-2009-2013.pdf

⁶⁸ Migrasi seumur hidup adalah penduduk yang tempat kelahirannya berbeda dengan tempat tinggal sekarang

⁶⁹ Migrasi risen adalah penduduk yang tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang

⁷⁰ Status Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta 2010, hal 269

⁷¹ Ibid, hal 271

Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur tahun
2011-2014

Keterangan: *= Data dari bulan April - Desember

Jumlah pendatang/urban ke Kelurahan Jatinegara lebih banyak jika dibandingkan dengan Kelurahan Rawa Terate. Hal ini disebabkan hampir seluruh wilayah Jatinegara merupakan pinggiran dari Kawasan Industri Pulogadung dan posisinya lebih strategis karena lebih banyak industri atau pabrik berada di wilayah ini dibandingkan Kelurahan Rawa Terate.

Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jatinegara sangat tinggi begitupun dengan Kelurahan Rawa Terate, menyebabkan pemukiman yang ada tidak sehat, antar rumah sangat rapat, tidak rapi, jorok, sumpek dan kurang layak. Hal ini akan menimbulkan masalah baru, seperti munculnya permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, kualitas lingkungan hidup yang kurang sehat, kriminalitas, ketidaknyamanan dan permasalahan lainnya.

b. Penurunan kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan di masa mendatang sangat tergantung pada sikap, ekspektasi dan tindakan manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya baik secara kelompok maupun secara individu.⁷²

Kualitas Lingkungan Hidup dapat didasarkan pada konsep Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), seperti yang dikembangkan oleh BPS, yang hanya mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan hutan.⁷³

1) Kualitas air sungai, situ dan air tanah

BPLHD Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan telah melakukan pemantauan kualitas air di 13 daerah aliran sungai yang mengalir di Provinsi DKI Jakarta dimana data yang diperoleh dapat dipakai sebagai dasar dari kebijakan pemerintah dalam pengendalian pencemaran sungai dan pengelolaan lingkungan.

Lokasi pengambilan sampel sungai dan situ yang berada di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate yang terkait dengan penelitian ini yaitu Sungai Petukangan (titik Kawasan PT. JIEP)⁷⁴ dan Situ Rawa Gelam⁷⁵ (di dalam kawasan Industri Pulogadung).

Parameter yang diteliti meliputi parameter fisika, kimia dan biologi yang disesuaikan dengan baku mutu air sungai yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukkan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di wilayah DKI Jakarta.

1. Kualitas Fisika

Parameter fisik meliputi kekeruhan, Daya Hantar Listrik (DHL), Zat padat terlarut (TDS) dan Zat padat tersuspensi (TSS).

⁷² Sumbangan, Op.cit, hal 40

⁷³ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2011, hal 7

⁷⁴ Kondisi fisik situ yaitu: (1) terbentuk secara buatan dengan luas $\pm 2,095$ Ha; (2) Sumber air berasal dari buangan sekitar dan air hujan; (3) Kondisi situ kurang terawat, dipenuhi tumbuhan air; (4) air bau, hitam dan tercemar; (5) terdapat proses pendangkalan karena sampah; (6) meluap pada musim hujan). Selain itu, bagian pinggir sungai sudah mengalami pengerasan. Diakses dari Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.

⁷⁵ Situ terbentuk secara buatan dengan luas $\pm 2,095$ Ha. Sumber air berasal dari buangan sekitar dan air hujan. Kondisi situ kurang terawat karena banyaknya tumbuhan air yang tumbuh di atas permukaan situ dan juga sampah yang memenuhi areal tepi sehingga terjadi pendangkalan akibat banyaknya sampah yang memenuhi permukaan situ. Situ ini berfungsi sebagai penampung air namun tidak termanfaatkan secara baik. Pada musim penghujan air pada situ meluap. Diakses dari Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.

Konduktivitas (Daya Hantar Listrik/DHL) adalah gambaran numerik dari kemampuan air untuk meneruskan aliran listrik.⁷⁶ *Total Dissolved Solid* (TDS) adalah bahan-bahan terlarut (diameter 10^{-6} mm) dan koloid (diameter 10^{-6} - 10^{-3} mm) yang berupa senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan lain, yang tidak tersaring pada kertas saring berdiameter 0,45 μ m. *Total Suspended Solid* (TSS) adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1 μ m) yang tertahan pada saringan *Millipore* dengan diameter pori 0,45 μ m. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air.⁷⁷

2. Kualitas Kimia

Kualitas kimia dilihat dari konsentrasi fosfat; parameter deterjen; BOD; *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan *Dissolved Oxygen* (DO).

Konsentrasi BOD menunjukkan kebutuhan oksigen mikroorganisme untuk mengurai senyawa organik yang terkandung dalam perairan. COD merupakan parameter yang menunjukkan kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi senyawa kimia anorganik dalam perairan. Parameter DO merupakan kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan cukup banyak oleh ikan dan organisme akuatik. Fosfat adalah buangan detergent.

3. Kualitas Biologi

Kualitas biologi ditentukan dari jumlah Coliform dan Fecal E. coli. Bakteri coliform merupakan parameter mikrobiologis terpenting bagi kualitas air minum. Bakteri coliform fekal adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen.

Escherichia coli adalah salah satu bakteri *coliform* total tidak berbahaya yang ditemukan dalam tinja manusia.⁷⁸

Parameter fisik, kimia dan biologi dari Sungai Petukangan dan Situ Rawa Gelam, peneliti uraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Kualitas Air Sungai Petukangan (Kawasan PT. JIEP)

No	Parameter	Baku Mutu	2011 (5-6 Desember)	2012 (22 November)	2013 (pemantauan periode ke-5)	2014
	Fisik					
1	DHL	1000 μ mhd/cm	Tad	tad	847.00	785.00
2	TDS	200 Mg/L	Tad	tad	425.00	438.00
3	TSS	200 Mg/L	Tad	tad	152.00	83.00
	Kimia					
4	BOD	20 Mg/L	66.93	69.65	69.80	56.51 (per.V)
5	COD	30 Mg/L	204.27	157.77	201.70	122.35
6	DO	3 Mg/L	0.00	5.60	2.80	0.00
7	Fosfat					1.97 (per.I)
8	Detergen	0.5 Mg/L	1.94	0.76	0.26	4.22 (per.IV)
	Biologi					
9	Fecal Coliform	4.000/100 ML	900.100 ⁶	800.10 ⁷	*	54.10 ⁵
10	Total Coliform	20.000/100 ML	3500.10 ⁷	1300.10 ⁷	22.000.000.000	123. 10 ⁵

Sumber: BPLHD Provinsi DKI Jakarta

Keterangan: * = Tidak terdefinisi

Tad = Tidak ada data

⁷⁶ Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012, hal 63

⁷⁷ Ibid, hal 64

⁷⁸ Ibid, hal 228

Kualitas fisik air Sungai Petukangan dari tahun 2013-2014 masih berada di bawah baku mutu, sehingga masih dalam kondisi aman. Sedangkan kualitas kimia air Sungai Petukangan dari tahun 2011-2014 hampir semua parameter telah melebihi baku mutu baik di bagian hulu maupun hilir, yaitu BOD, COD, DO, detergen (Senyawa Aktif Metilen) dan fosfat. Dan kualitas Biologi air Sungai Petukangan yang terdiri dari Total Coliform/Konsentrasi Total Coli (MPN) dan Fecal Coliform sangat buruk karena sudah sangat jauh melebihi baku mutu yang ditentukan.

Tabel 3
Kualitas Air Situ Rawa Gelam

No	Parameter	Baku Mutu	2012 (5 Agustus)			2013			2014 (18 Agustus)		
			I	T	O	I	T	O	I	T	O
1	Fisik										
	DHL	1000 µmhod/cm	25,70	25,90	26,00	1290	595	650	760,00	690,00	683,00
	TDS	500 Mg/L	405,00	479,00	522,00	768	473	462	487,00	441,00	440,00
	TSS	100Mg/L	11,00	65,00	128,00	44	41	44	131,00	129,00	136,00
2	Kimia Anorganik										
	Fosfat (PO ₄)	0.5 Mg/L	0,55	1,15	1,49	0,77	0,28	0,37	2,26	1,43	0,95
	Detergen	0.5 Mg/L	0,73	0,71	1,39	0,46	0,53	0,57	1,62	0,55	0,62
	BOD	20 Mg/L	10,66	5,50	6,84	26,8	52	42	16,13	17,91	15,71
	COD	30 Mg/L	<40,00	<40,00	<40,00	93,2	191,7	138,3	191,01	235,96	232,96
	DO	3 Mg/L	0,40	0,41	0,47	6,5	8,1	9,7	6,62	6,29	6,99
3	Biologi										
	Fecal Coliform	20.000/100 ml	270x10 ⁴	1100x10 ⁴	80x10 ⁴	1500x10 ⁴	190000	160000	2,6x10 ⁴	10x10 ⁴	5,2x10 ⁴
	Total Coliform	4000/100 ml	700x10 ⁴	1100x10 ⁴	240x10 ⁴	1700x10 ⁴	2300000	1900000	7,9x10 ⁴	80x10 ⁴	9,8x10 ⁴

Sumber: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2014

Keterangan: I : Inlet

T: Tengah

O: Outlet

Kualitas air situ rawa gelam yang melebihi baku mutu dari tahun 2012-2014 diantaranya konsentrasi Fosfat, COD, Fecal coliform, Total coliform, detergent, DO (dari tahun 2013-2014), TSS (tahun 2014).

Pada tahun 2011, kualitas air tanah di titik 404 (Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung) kualitas Mangan (Mn) telah melebihi baku mutu (Baku Mutu Mn = 0.50 mg/L) dengan nilai 4.52 mg/L per Bulan September dan nilai 2,71 mg/L per Bulan November. Selain itu, Pada Bulan November di titik tersebut juga kualitas biologis (bakteri koli dengan Baku Mutu = 50 Jml/100 ml) air tanahnya sudah buruk dengan nilai 30.000 Jml/100 ml.⁷⁹ Pada tahun 2014, parameter yang melebihi baku mutu adalah total coliform.⁸⁰

Berdasarkan pengamatan peneliti secara langsung, ada limbah cair yang dikeluarkan dari beberapa perusahaan ke saluran buangan/selokan bentuknya masih keruh, berwarna dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Hal ini bertentangan dengan ciri-ciri air bersih, yaitu, "Air bersih ialah air yang jernih, tidak berwarna, tawar dan tidak berbau. Jernih berarti ia bebas/sedikit sekali tercemar lumpur. Tidak berwarna menunjukkan bahwa ia tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kalau terasa asin atau asam, tandanya kualitas air rendah. Bau busuk yang sering tercium di air

⁷⁹ Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

⁸⁰ Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014

ciri terjadinya proses pelapukan bahan-bahan organik oleh mikroorganisme di dalam air”.⁸¹

2) Kualitas Udara

Limbah gas di DKI Jakarta menjadi penyebab penurunan kualitas udara yang digolongkan ke dalam sumber tidak bergerak (kegiatan industri, rumah tangga dan pembakaran sampah) dan sumber bergerak (kegiatan transportasi).⁸²

Pengambilan sampel kualitas udara dilakukan sejak Bulan Januari-Desember 2010 dengan frekuensi 2 kali sebulan, dengan parameter yang dipantau meliputi Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Debu (TSP).⁸³

Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan hasil pengambilan sampel dengan baku mutu udara ambien berdasarkan SK Gubernur Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Terdapat 9 lokasi pengambilan sampel kualitas Udara Ambien DKI Jakarta, dan salah satunya adalah PT. JIEP (Rawa Terate) dengan ketinggian 3 meter. Kualitas Udara dengan titik di PT. JIEP, peneliti uraikan sebagai berikut:

a) Parameter Debu (TSP)

TSP adalah molekul-molekul kecil yang dihasilkan oleh proses mekanis. Rata-rata Parameter Debu (TSP) untuk tahun 2010 dan 2011, kadar TSP di PT.JIEP sudah melebihi baku mutu yang ditentukan (BM TSP : 230 µg/Nm³/24 jam) yaitu tahun 2010 berjumlah 255,3 µg/Nm³/24 jam dan tahun 2011 berjumlah 266,3 µg/Nm³/24 jam.⁸⁴ Pada tahun 2012, 2013, dan 2014 meskipun rata-rata di bawah baku mutu, akan tetapi di bulan tertentu ada yang konsentrasinya melebihi baku mutu.

b) Parameter Nitrogen Dioksida (NO₂)

NO₂ adalah senyawa kimia berwarna merah-kecoklatan dan merupakan gas beracun, baunya menyengat dan salah satu polutan udara utama.⁸⁵ Dari tahun 2010-2014 konsentrasi NO₂ untuk waktu 1 jam pengukuran masih berada di bawah baku mutu (berdasarkan SK Gubernur No.551/2001 yaitu untuk parameter NO₂ 400 µg/m³/24 jam), yang tertinggi tahun 2010 yaitu 266,8 µg/m³/24 jam dan yang terendah pada tahun 2012 yaitu 18,3 µg/m³/24 jam.⁸⁶

c) Parameter Sulfur Dioksida (SO₂)

SO₂ merupakan pencemar sekunder yang terbentuk akibat reaksi antara zat pencemar primer dan dibantu oleh unsur-unsur meteorologis (radiasi matahari dan curah hujan). Semua pengukuran nilai SO₂ dari tahun 2010-2014 masih jauh di bawah baku mutu (900 µg/m³/24 jam) dan parameter SO₂ nya masih bagus, tertinggi pada tahun 2011 yaitu 19,7 µg/m³/24 jam dan terendah pada tahun 2010 yaitu 6,75 µg/m³/24 jam.⁸⁷

d) Parameter Timbal (Pb)

Timbal adalah logam yang mendapat perhatian khusus karena sifatnya yang toksik (beracun) terhadap manusia. Kandungan logam (Pb) di Kawasan Industri Pulogadung dari tahun 2010-2014 masih berada di bawah baku mutu (2 µg/m³/24

⁸¹ Onny Untung, *Menjernihkan Air Kotor*, Jakarta: Puspa Swara, 2008, hal 6-7

⁸² Ibid, hal 153

⁸³ Ibid, hal 157

⁸⁴ BPLHD Provinsi DKI Jakarta 2014

⁸⁵ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_dioksida, tanggal 27 Juni 2016, pukul 00.47

⁸⁶ BPLHD Provinsi DKI Jakarta 2014

⁸⁷ BPLHD Provinsi DKI Jakarta 2014

jam) yaitu terbanyak pada tahun 2013 dengan jumlah 0,332 dan terendah pada tahun 2011 dengan jumlah 0,022.⁸⁸

e) Parameter Ozon (O₃)

Ozon (oksidan fotokimia) merupakan bahan pencemar lain yang berasal dari cerobong (bahan pencemar primer) yang terbentuk dari gas NO yang bereaksi dengan Oksigen (O₂) dengan perantaraan sinar matahari. Parameter ozon ini berbahaya ketika matahari sedang terik antara jam 12.00-13.00 siang hari.

Dari tabel di atas, konsentrasi ozon di PT.JIEP masih berada di bawah baku mutu (235 µg/Nm³/24 jam), sehingga hal ini tidak terlalu berbahaya bagi masyarakat. Tertinggi pada tahun 2012 dengan jumlah 73 µg/Nm³/24 jam dan terendah pada tahun 2013 dengan jumlah 56 µg/Nm³/24 jam.⁸⁹

Di kawasan PT.JIEP yang menjadi parameter kritis untuk udara adalah TSP (Debu) dengan kondisi dari 24 pengukuran, 19 pengukuran (79%) diantaranya telah melebihi baku mutu. Tingginya konsentrasi TSP di wilayah tersebut disebabkan karena aktivitas industri seperti kegiatan pembakaran.

3) Tutupan Hutan

Hutan selain memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan air, juga sebagai tempat tinggal fauna tertentu, tempat tumbuhnya plasma nutfah yang memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu hutan yang masih eksis keberadaannya di Kota Jakarta Timur adalah Hutan Kota PT. JIEP yang terletak di tengah Kawasan Industri Pulogadung.

Hutan Kota PT. JIEP Pulogadung Jakarta Timur. Hutan ini dikelola oleh PT.JIEP berdasarkan surat persetujuan pengelolaannya tahun 1988, merupakan bagian ruang terbuka hijau penyangga kawasan industri, dan wilayah resapan air (hidrologi). Secara hukum diperbarui melalui SK Gubernur Nomor 870/2004. Luas kawasan hutan kota berdasarkan penetapannya 8,9 Ha. Kerapatan pohon ini tinggi yaitu mencapai 5.600 Ind/Ha. Secara geografis terletak pada 6°51'23" LS dan 106°49'32" BT. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahannya, kawasan ini termasuk wilayah Kota Jakarta Timur, Kecamatan Cakung dan Kelurahan Rawa Terate. Pada kawasan ini terdapat situ yang mampu menampung air kurang lebih 235 juta M³ dengan kedalaman rata-rata 4,5 M. Karena lokasinya di daerah industri warna airnya keruh dan kehitam-hitaman dan dasar situ berlumpur organik 0,65 M. Kawasan hutan ini selain berfungsi sebagai kawasan penyangga lingkungan fisik kritis kawasan industri, sangtuari satwa, wahana rekreasi dan wisata. Fungsi utama hutan kota ini sebagai penampung air limpasan dari wilayah sekitarnya dan penetralisir limbah.⁹⁰

c. Kualitas kesehatan masyarakat menurun

Kualitas hidup masyarakat mengalami penurunan dalam hal ini khususnya di bidang kesehatan. Sepuluh penyakit terbanyak di Puskesmas Kelurahan Rawa Terate Tahun 2015 diantaranya Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) sebanyak 4.402, Hipertensi sebanyak 3.184, Penyakit lainnya sebanyak 2.193, Gastritis sebanyak 851, DM sebanyak 847, Penyakit kulit alergi sebanyak 770, Penyakit sistem otot dan jaringan sebanyak 637, penyakit kulit infeksi sebanyak 603, diare sebanyak 550 dan Rheumatoid Arthritis sebanyak 427.⁹¹ Kondisi

⁸⁸ BPLHD Provinsi DKI Jakarta 2014

⁸⁹ BPLHD Provinsi DKI Jakarta 2016

⁹⁰ Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010, hal 50-51

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Michelle Andrea, perawat di Puskesmas Kelurahan Rawa Terate, tanggal 18 Mei 2016, pukul 11.50

kesehatan masyarakat Kelurahan Jatinegara cukup baik, namun banyak yang menderita ISPA akibat limbah yang mengganggu dan polusi udara (debu, aroma tidak sedap dari buangan asap pabrik).⁹²

d. Perusahaan tidak taat aturan

Terdapat beberapa perusahaan di Kawasan Industri Pulogadung yang masih belum taat terhadap peraturan yang berlaku dan dibuat oleh pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada para pelaku usaha.

Perusahaan yang tidak/kurang taat dapat dilihat dari hasil pengawasan (baik dari pengawasan aktif maupun pasif) dan sanksi yang diberikan sebagai rekomendasi dari hasil pengawasan tersebut (sesuai dengan PermenLH 02 Tahun 2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif) yang diberikan oleh KPLH Jakarta Timur.

Komponen-komponen pengelolaan lingkungan hidup yang diawasi oleh KPLH Jakarta Timur terhadap pelaku industri di atas antara lain: Dokumen lingkungan; Pengendalian pencemaran air; Pengendalian pencemaran udara emisi sumber tidak bergerak; Pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; Pengendalian pencemaran udara kebisingan; Pengendalian pencemaran udara – kawasan dilarang merokok; Pengendalian pencemaran limbah padat; dan Pengendalian pencemaran limbah B3.

Pada Tahun 2015, sanksi administratif terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPLHD Jakarta Timur kepada para pelaku industri di Kawasan Industri Pulogadung diberikan kepada 42 usaha diantaranya, PT. Tira Austenite, PT. Eka Wijaya Indah, PT. Guna Elektro, PT. Eslar Utama, PT. SAI Indonesia, PT. Metropolitan Development, PT. Sinar Himalaya dan beberapa perusahaan lainnya.⁹³

Pada Bulan Maret 2016, terdapat 11 perusahaan di Kawasan Industri Pulogadung yang tidak taat dan sebagian besar dikenakan sanksi administratif (berupa teguran tertulis) dari KPLHD Jakarta Timur yaitu PT. Kemang Food Industri, PT. Sinar Meadow, PT. Pangan Sari Utama, PT. Multi Guna Gas, PT. Tempo Nagadi, PT. Astra Argo Lestari, PT. Gikoko Kogyo Indonesia, PT. Menjangan Sakti (Menza Encore), dan PT. Dodo Active Wear serta berupa pengawasan lanjutan kepada PT. Mahakam Beta Farma (Graha Mahakam) dan PT. Pelangi Nusa Gemilang.⁹⁴

Pengawasan ini bisa berasal dari pengawasan baik sifatnya langsung maupun tidak langsung dari BPLHD/KPLH Jakarta Timur terhadap Kawasan Industri Pulogadung, juga dapat berasal dari masyarakat berupa pengaduan yang disampaikan kepada BPLHD/KPLH Jakarta Timur. Pengaduan tersebut rata-rata mengeluhkan polusi udara dan air akibat dari aktivitas pabrik belerang dan pabrik besi (2014), PT. Nobi Putra Angkasa (2011).

e. Peningkatan kerawanan sosial dan kriminalitas

Penduduk yang heterogen di DKI Jakarta dapat memunculkan potensi kerawanan maupun konflik sosial. Dilihat dari beberapa wawancara dengan informan dan Laporan Tahunan Kelurahan Jatinegara Tahun 2011-2015, diketahui bahwa baik di Kelurahan Jatinegara maupun Kelurahan Rawa Terate terdapat kriminalitas yang masih terbilang tinggi yaitu seperti tawuran (paling banyak terjadi 9 kali di Kelurahan Jatinegara tahun 2014), unjuk rasa (Kelurahan Jatinegara 5 kali tahun 2014), kebakaran (terbanyak terjadi 17 kali di Kelurahan Jatinegara tahun 2015), pencurian motor dan narkoba (pedagang dan pemakai). Penyebab dari kebakaran yaitu tingginya kerapatan antar rumah, sehingga api sangat mudah menyebar dari satu rumah ke rumah lain.

⁹² Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas kelurahan Jatinegara dr. Rony Simajuntak, tanggal 19 Mei 2016, pukul 14.58

⁹³ Rekapitulasi Sanksi Administratif Usaha di Jakarta Timur oleh KPLH Jakarta Timur Tahun 2015

⁹⁴ Kesimpulan dan rekomendasi hasil pelaksanaan Pengawasan oleh Satuan Tugas Pengawasan Lingkungan KPLH Kota Administrasi Jakarta Timur

Terdapat beberapa strategi yang dihasilkan sebagai implikasi persilangan antara faktor internal dan faktor eksternal dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pulogadung pada tabel di atas yaitu:

1. Mengintensifkan pengawasan terhadap kegiatan industri

Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam rangka meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dimungkinkan dapat terjadi. Pengawasan yang dilakukan di Kawasan Industri Pulogadung terdiri dari 2 jenis, yaitu:

- a. Pengawasan pasif, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memeriksakan contoh air limbah berkala di UPT Laboratorium. Penetapan status ketaatan dalam pengawasan pasif didasarkan atas data-data laporan swapantau dan hasil uji laboratorium terhadap contoh air limbah yang dikirimkan usaha dan/atau kegiatan ke BPLHD. Dalam hal ditemukan indikasi manipulasi data laporan dan/atau contoh air limbah maka usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam sasaran kegiatan pengawasan aktif.
- b. Pengawasan aktif, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan secara langsung di lokasi/tempat usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh petugas BPLHD Provinsi DKI Jakarta dan/atau KLH Kota/Kabupaten Administrasi disertai pengambilan contoh air limbah.⁹⁵

Kawasan Industri Pulogadung bentuknya adalah kawasan, sehingga dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapat izin lingkungan yaitu dokumen UKL-UPL. Dan yang berwenang untuk mengawasi kawasan ini adalah KPLH Jakarta Timur karena lingkup yang diawasi lebih kecil yaitu skala UKL-UPL, sedangkan BPLHD Provinsi mengawasi perusahaan yang memiliki AMDAL yang lingkup dampaknya lebih besar/luas.

Pengawasan yang dilakukan oleh KPLH Jakarta Timur terhadap aktivitas usaha termasuk salah satunya industri di Kawasan Industri Pulogadung kurang maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga ahli/pegawai untuk melakukan pengawasan tersebut yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Jakarta Timur. PPLHD Jakarta Timur yang ada saat ini hanya berjumlah 2 orang, mereka memiliki beban tugas yang cukup berat yaitu mengawasi sekitar 800 perusahaan. Untuk di Jakarta Timur, idealnya dibutuhkan 8 orang PPLHD untuk dapat mengawasi kegiatan usaha dengan baik. Selain disebabkan kurangnya SDM, pengawasan di Kawasan Industri Pulogadung juga kurang diprioritaskan, sehingga pengawasan aktif yang dilakukan disini masih sedikit. Hal ini dapat disebabkan kawasan industri ini bukan seluruhnya/utuh milik Pemerintah DKI Jakarta, karena sahamnya 50:50 antara Pemerintah DKI dan BUMN. Selain itu, KPLH Jakarta Timur akan bergerak untuk melakukan pengawasan jika ada permintaan dari pengelola kawasan (PT.JIEP) atau ada pengaduan dari masyarakat sekitar.

2. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam pendidikan berbasis lingkungan

Pendidikan berbasis lingkungan perlu diberikan khususnya kepada anak-anak tak terkecuali masyarakat pada umumnya. Pendidikan ini akan lebih baik jika diberikan sejak kecil agar ilmu mudah diserap, dipahami dan diimplementasikan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi suatu kebiasaan dan lama kelamaan menjadi budaya. Selain itu, pendidikan lingkungan diharapkan dapat merubah kondisi lingkungan yang rusak dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jika pendidikan lingkungan ini sudah membudaya di masyarakat, maka hal ini akan meminimalisir masalah lingkungan.

3. Memberikan pelatihan kepada pegawai sesuai bidangnya masing-masing

⁹⁵ Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 262 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembinaan Dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta, Bab VII ayat (1) dan ayat (2)

Fenomena di Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini adalah sering terjadinya *rolling* jabatan (baik pemimpin maupun staf). Hal ini tentu mempengaruhi struktur kelembagaan yang telah ada. Dengan adanya *rolling* yang cepat, maka tenaga-tenaga ahli menjadi berkurang. Hal ini berpengaruh pada tingginya beban kerja yang diberikan pada pegawai karena kurangnya tenaga ahli dalam bidang tertentu, seperti salah satunya auditor di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, kemudian juga PPLHD baik di KPLHD Jakarta Timur maupun di BPLHD Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha di Provinsi DKI Jakarta, *surveyor* untuk melakukan pemantauan di bidang pemantauan BPLHD Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu, perlu diadakan pelatihan/*training* bagi pegawai sebagai upaya untuk menambah tenaga ahli dengan kemampuan/keahlian yang dibutuhkan, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara optimal.

4. Mensosialisasikan pengelolaan sampah ramah lingkungan kepada masyarakat

Sampah sampai saat ini masih menjadi masalah krusial di Provinsi DKI Jakarta. Persentase masyarakat yang peduli terhadap sampah masih sedikit, yaitu dengan mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau bernilai guna. Kegiatan ini lebih dikenal dengan nama “Bank sampah”. Bank sampah ini suatu bank yang transaksi antara nasabah dan pihak bank berupa sampah, nasabah memberikan sampah dan pihak bank memberikan uang/dimasukkan ke dalam tabungan nasabah sesuai dengan besaran timbangan sampah yang dibawa nasabah. Selain mengurangi beban Pemerintah DKI Jakarta dalam mengelola sampah, juga memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan menabung dengan cara yang unik.

Pengelolaan sampah ramah lingkungan juga dapat berupa pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan warga pribadi di rumah masing-masing. Peneliti dapatkan informasi dari BPLHD bahwa mereka menggalakkan pengomposan skala rumah tangga dengan metode takakura (menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana dan tidak mahal). Metode ini cukup mudah dan dapat dilaksanakan di rumah masing-masing dan mengurangi volume sampah rumah tangga yang biasanya susah untuk dikelola kembali karena sifatnya yang cepat membusuk. Dengan metode tersebut, warga dapat menggunakan kompos yang dihasilkan baik untuk dikonsumsi sendiri atau dapat juga dijual, sehingga memberikan sedikitnya penghasilan tambahan.

Selain itu, menggalakkan kembali 3R yaitu *Reuse, Reduce and Recycle*. Pengelolaan 3R ini jika dikelola dengan baik selain dapat menghasilkan kompos, juga dapat menjadi sumber listrik yaitu yang kita sebut Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).

5. Mengadakan koordinasi rutin dengan daerah lain untuk meminimalisir urbanisasi

Tingkat urbanisasi di Provinsi DKI Jakarta persentasenya sudah stagnan 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa minat para migran ke Jakarta sangat tinggi sekali. Sebagian besar para urban beralasan bahwa Jakarta memberikan pekerjaan yang lebih layak dengan penghasilan jauh lebih tinggi dibandingkan tempat asal dulu. Meskipun ini terkait hak asasi manusia, tapi hal ini akan menambah masalah baru di Ibukota, seperti timbulnya permukiman kumuh, kriminalitas, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masalah lainnya. Sayangnya, sampai saat ini belum ada strategi efektif untuk menyelesaikan masalah urbanisasi. Padahal ini menjadi masalah bersama antar daerah.

Oleh sebab itu, Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah di pinggiran Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok dan daerah lainnya untuk mengurangi urbanisasi, khususnya dalam hal ini di sekitar Kawasan Industri Pulogadung. Perlu adanya beberapa strategi yang dibentuk bersama agar Jakarta dan daerah pinggiran dapat maju beriringan dan tidak terjadi disparitas antar daerah.

6. Memperketat penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan

Perusahaan yang melanggar aturan di Kawasan Industri Pulogadung masih banyak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengawasan yang dilakukan Kantor Pengelola Lingkungan

Hidup Daerah (KPLHD) Jakarta Timur baik, dilihat dari dokumen lingkungannya maupun dari pengawasan langsung (inspeksi mendadak).

Penegak hukum di KPLH Jakarta Timur berwenang untuk menentukan tindakan yang sebaiknya diambil terhadap rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan PPLHD Jakarta Timur. Sanksi yang dapat diberikan yaitu sanksi administratif yang terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan sampai pada pencabutan izin lingkungan.⁹⁶ Sebagian besar sanksi yang diberikan oleh KPLHD Jakarta Timur kepada perusahaan di Kawasan Industri Pulogadung Bulan Maret tahun 2016 baru berupa sanksi administratif (teguran tertulis), meskipun ada usaha yang mendapatkan tindakan pengawasan lanjutan, tapi jumlahnya hanya sedikit.

Penegakan hukum di KPLH Jakarta Timur sebagai bentuk pelaksanaan terhadap amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya terhadap Kawasan Industri Pulogadung perlu diperketat kembali mengingat masih banyak perusahaan yang tidak patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

7. Mendorong *stakeholder* untuk peduli lingkungan

Menjaga lingkungan bukan menjadi tugas pemerintah semata, melainkan seluruh *stakeholders* yakni masyarakat dan pihak swasta memiliki peran masing-masing dalam memelihara lingkungan. Ketiga pihak tersebut harus bersinergi dalam menjaga agar lingkungan terpelihara. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung lingkungan agar dapat tetap bersih, sehat, terjaga. Swasta berperan dalam membantu keterbatasan pemerintah, salah satu contohnya memberikan bantuan baik berupa dana atau fisik. Masyarakat berperan dalam mendukung pemerintah dengan berpartisipasi dan ikut andil dalam setiap program atau kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.

Oleh sebab itu, perlu kiranya pemerintah mengajak, menggerakkan ataupun menstimulasi swasta dan pemerintah dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan pemerintah khususnya yang mendukung lingkungan.

8. Melakukan pembinaan fisik dan batiniah kepada masyarakat.

Kriminalitas dan kerawanan sosial di sekitar Kawasan Industri Pulogadung yakni di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate masih terbilang tinggi, baik itu berupa tawuran, pencurian motor, kebakaran, perampokan dan narkoba. Hal ini dapat meningkatkan keresahan dan mengurangi rasa aman masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kelurahan baik Jatinegara maupun Rawa Terate untuk selalu merangkul seluruh elemen masyarakat (anak-anak, remaja dan orang tua/lansia) dan menyelenggarakan pembinaan fisik dan batiniah kepada warga. Pembinaan fisik yakni diantaranya dengan memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga bersama seminggu sekali baik di Kantor Kelurahan atau di lapangan yang ditentukan bersama (misal main *volley*, basket, futsal dan sebagainya). Sedangkan pembinaan batiniah yakni dengan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan (kajian, ceramah) sebulan 2 kali atau tergantung dari kesepakatan bersama. Dengan rutinnnya dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka masyarakat mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang dapat mengalihkan kegiatan-kegiatannya yang kurang bermanfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 76 ayat (2)

1. Strategi Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sekitar Kawasan Industri Pulogadung, diantaranya:
 - 1) Mengintensifkan pengawasan terhadap kegiatan industri;
 - 2) Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam pendidikan berbasis lingkungan;
 - 3) Memberikan pelatihan kepada pegawai sesuai bidangnya masing-masing;
 - 4) Mensosialisasikan pengelolaan sampah ramah lingkungan kepada masyarakat;
 - 5) Mengadakan koordinasi rutin dengan daerah lain untuk meminimalisir urbanisasi;
 - 6) Memperketat penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan;
 - 7) Mendorong *stakeholder* untuk peduli lingkungan;
 - 8) Melakukan pembinaan fisik dan batiniah kepada masyarakat.

SARAN

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan terhadap kesimpulan penelitian ini, yaitu:

1. 1) Pemerintah daerah segera melakukan training bagi pegawai atau menambah pegawai baru;
Training kepada pegawai atau Penambahan pegawai disini khususnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik di BPLHD Provinsi DKI Jakarta dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Timur yang secara khusus menangani pengawasan dan penyidikan agar seluruh kegiatan usaha/industri khususnya di Kawasan Industri Pulogadung dapat terawasi secara intensif.
- 2) Pemerintah daerah perlu memfasilitasi *stakeholders* untuk lebih peduli terhadap lingkungan;
Dapat diberikan melalui penyuluhan/sosialisasi/edukasi berbasis lingkungan secara berkesinambungan kepada masyarakat dan swasta memahami arti pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah perlu mendorong perusahaan/pelaku industri dan masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan.
- 3) Pemerintah daerah seyogianya melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar;
Kerja sama ini dilakukan dalam rangka mengurangi urbanisasi dan permasalahan lingkungan di Ibukota dan di daerah-daerah pinggiran DKI Jakarta. Selain itu, hal ini dilakukan untuk meminimalisir tingginya disparitas antar daerah.
- 4) Pengelola kawasan membuat lagoon kawasan.
Lagoon kawasan dibuat dengan maksud agar pengelolaan limbah menjadi terpadu dan dapat terkontrol dengan baik serta meminimalisir penyimpangan yang dapat dilakukan para pelaku industri. Jika tidak dibuat lagoon kawasan, sebaiknya dilakukan relokasi kawasan ke daerah pinggiran atau dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan pendistribusian produk/barang ke daerah lain. Hal ini mengingat DKI Jakarta sudah tidak cocok untuk dijadikan kawasan industri lagi, melainkan kota jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Raharjo, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azis, Iwan J., Lydia M.Napitupulu, dkk., 2010, *Pembangunan Berkelanjutan-Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta: KPG.
- Baja, Sumbangan, 2012, *Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah: Pendekatan Spasial & Aplikasinya*, Yogyakarta: ANDI.
- Bruntland, Gro Harlem, 1987, *Our Common Future*. The World Commission on Environment and Development, Oxford, New York: Oxford University Press.Hadi,

- Sudharto P, 2012, *Dimensi Lingkungan-Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Hefni, 2012. *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hunger, J.David, & Thomas L. Wheelen, 2003, *Strategic Management 5th Edition (Manajemen Strategis)*, yang diterjemahkan oleh Julianto Agung-Ed.II, Yogyakarta: Andi
- Ireland, R. Duane, Robert E. Hoskisson & Michael A. Hitt, 2008, *The Management of Strategy-Concept and Cases*, South Western: Cengage Learning.
- IUCN-The World Conservation Union, 1995, *A Sustainable World, Defining and Measuring Sustainable Development*, North America: International Center for the Environment and Public Policy.
- Junaidi, Muhammad, 2013, *Korporasi dan Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Alfabeta.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Solihin, Ismail, 2012, *Manajemen Strategik*, Bandung: Erlangga.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2007, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Untung, Onny, *Menjernihkan Air Kotor*, Jakarta: Puspa Swara, 2008, hal 6-7
- Widoyoko, Eko Putro, 2012 *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website

www.menlh.go.id

<http://jiep.co.id/profil-kip/profil-kawasan/>

http://www.bps.go.id/booklet/Booklet_Agustus_2012.pdf

http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/EVALUASI-RUKUN-WARGA--RW--KUMUH-DKI-JAKARTA-2013.pdf,

<http://www.aktual.co/jakartaraya/angka-kriminalitas-di-jakarta-timur-masih-tinggi>

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-2.pdf

http://beritajakarta.com/read/2413/Limbah_Tahu_di_Jaktim_Cemari_Lingkungan

<http://www.Rawaterate.net/>

Lain-lain

Djajadiningrat, Surna T., 1990, "*Population and Development for a Sustainable Future*", paper presented in the Seminar "*World Without Borders : Policy Options for Growth and Sustainability in East Asia and the Pacific*, conducted by Society for International Development East Asia and the Pacific Regional Conference, Jakarta, Yogyakarta, Bali, July 18-22.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2011,

Status Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta 2010, 2011, 2014